

KETIKA OLIGARKI MENYANDERA PARTAI POLITIK: STUDI KASUS MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TAHUN 2016

Bob Samuel - 14010115130120

bob.samael@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., MPP.**

alfirdausl_laila@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016 merupakan upaya mendemokratisasikan Partai Golkar. Kecenderungan pragmatis politik di masyarakat terutama di negara berkembang utamanya di Indonesia adalah alasan terhambatnya Partai Golkar untuk mendemokratisasikan partainya. Peneliteian ini menggunakan metode peneliteian kualitatif. Subjek data yaitu pemilih dalam Munaslub, panitia Munaslub, dan penelitei politik. Munaslub Partai Golkar 2016 dihelat atas dasar penyelesaian konflik diantara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono pada masa Pemilu Presiden 2014. Konflik tersebut memaksa diadakannya penyelesaian karena adanya konflik tersebut menghambat aktivitas partai. Sejak adanya konflik tersebut, tujuan utama dari konflik tersebut adalah konsensi dari elite partai. Begitupula konflik tersebut adalah proses transaksi politik yang bertujuan menguntungkan kepentingan elite partai tersebut. Pola penyelesaian konflik tersebut menyatakan bahwa ada oligarki yang menguasai Partai Golkar. Sebagai partai besar, Partai Golkar masih kesulitan menghadapi tantangan oligarki di internal partainya. Kecenderungan tersebut dalam kasus Munaslub Partai 2016 dikarenakan biaya politik yang besar untuk dapat jadi Calon Ketua Umum. Dari segi pemilih –pun menyadari bahwa Calon Ketua Umum harus memiliki kemampuan finansial yang berlebih. Alasan tersebut relevan dengan fakta di Indonesia pembiayaan partai kurang dialokasikan oleh negara. Setya Novanto “saudagar kaya” sebagai Ketua Umum terpilih adalah representasi dari praktik paradoks demokrasi di internal partai politik terutama Partai Golkar.

KATA KUNCI

Partai Golkar, Munaslub 2016, Ketua Umum

Pendahuluan

Partai Politik memiliki posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik bahkan disebut sebagai kunci berjalannya sebuah demokrasi. Schattsneider (1942) mengatakan “*Political parties created democracy*” yang berarti keberadaan demokrasi sangat tergantung kepada partai politik.¹ Demokrasi menjadi pilihan banyak Negara di dunia, karena tidak seperti bentuk lain dari sebuah sistem pemerintahan, demokrasi memungkinkan warga negara untuk mengejar dengan bebas apa yang mereka harapkan untuk kehidupan pribadi mereka sendiri lewat pemilu yang kompetitif dan bebas serta diselenggarakan secara teratur.² Namun demikian, tidak jarang terjadi partai politik justru tidak lebih dari sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik yang tertentu “*at the expense of the general will*” atau kepentingan umum (Perot, 1992)³. Dengan demikian, partai politik justru menjadi paradoks demokratis, hal ini dikarenakan partai politik dikuasai oleh segelintir orang maupun seseorang yang tidak lain adalah pemilik sumber daya (*resources*) yang besar dan pendiri partai tersebut. Skripsi ini bermaksud meneliti proses yang kadang sangat oligarkis dengan mengambil Studi Kasus Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub 2016.⁴ Dari kasus pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pun unsur personalisasi kaum elite yang sangat kuat mampu berusaha mengatur hasil pemilihan. Proses ini menjelaskan derajat demokratisasi internal partai politik yang ada di tubuh Partai Golkar. Sebab diadakan penelitan ini karena perhelatan Munaslub yang memenangkan Setya Novanto memiliki unsur pragmatisme politik yang tidak konsisten dengan nilai-nilai demokratisasi, dengan demikian skripsi ini akan menguji keabsahan dari hal tersebut dengan meneliti berjalannya Munaslub itu sendiri.

Dalam pemilihan pada Munaslub 2016, perolehan suara Setya Novanto dan Ade Komarudin berada di situasi yang seimbang karena memperoleh sama-sama 30% suara dari 560 pemilih.⁵ Secara AD/ART hal ini dinyatakan bahwa kemenangan diperoleh kedua secara bersamaan yang berarti bahwa keduanya secara sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.⁶ Akan tetapi hal ini dapat berjalan secara dinamis karena pengambilan keputusan dapat berjalan dengan menggunakan mekanisme

¹ Schattsneider, *Party Government*, (New York: Farrar & Rimehart, 1942), hlm. 20.

² Pendapat ini didukung oleh Yves Meny dan Andrew Knapp, “*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*” yang berarti Sebuah sistem demokrasi tanpa partai politik atau dengan tanpa satu partai pun sangat tidak mungkin atau sulit untuk dibayangkan. Dikutip dari: Yves Meny dan Andre Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany (Comparative European Politics)*, (Inggris: Oxford University Press, 1998), edisi ketiga, hlm. 24.

³ Dikutip dari: Steven A Holmes, *The 1992 Elections: Disappointment – New Analysis an Eccentric but No Joke; Perot’s Strong Showing Raises Questions On What Might Been, and Might Bee*”, <https://www.nytimes.com/1992/11/05/us/1992-elections-disappointment-analysis-eccentric-but-no-joke-perot-s-strong.html>, New New York Times, 1992, diakses pada 22 Desember 2018, hlm. 1.

⁴ Pendapat ini didukung oleh Robert Michels dalam suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi yang mengatakan bahwa “*Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki*”. Dikutip dari kata pengantar Seymour Martin Lipset dalam Robert Michael, *Partai Politik Dalam Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, Terj. (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 27.

⁵ Rappler, “*Hasil Munaslub Golkar: Setya Novanto Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum*”, <http://www.rappler.com/indonesia/133291-setya-novanto-resmi-terpilih-jadi-ketua-umum-golkar>, Rappler, 2016, diakses pada 27 Desember 2018, hlm. 1.

⁶ Partai Golkar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar Tahun 2016*, Anggaran Rumah Tangga, bab V tentang Struktur dan Kepengurusan, pasal 12, ayat 4.

musyawarah atau pun dapat melalui mekanisme pengambilan suara lagi.⁷ Hal ini akan dilihat dengan meneliteli Setya Novanto dengan proses pencalonannya sebagai Ketua Umum, begitu pula dengan strategi politik yang ia gunakan dalam proses pemilihan Ketua Umum lalu sebagai luaran dari pemilihan akan dilihat faktor apa yang mendasari Setya Novanto dalam mendapatkan suara sedemikian rupa sehingga menjadikannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar di periode 2016-2019. Beberapa catatan pula hal ini juga dihubungkan dengan kondisi Partai Golkar yang mengalami perubahan, di mana beberapa aturan yang telah berubah yang memiliki hubungan dengan proses pemilihan Ketua Umum organisasi kepartainnya. Pada situasi ini, Ade Komarudin juga mengaku mengalah dengan Setya Novanto. Ada dugaan bahwa hal ini memiliki hubungan dengan pragmatisme politik yang ada di dalam Partai Golkar.

Pragmatisme politik Partai Golkar dapat dilihat dari dua hal yaitu pertama dari sisi proses rekrutmen kader partai yakni terlihat perekrutan calon-calon legislatif yang diusung partai dan terutama di dalam proses Musyawarah Nasional Partai Golkar pada saat pemilihan pimpinan partai. Kedua dari sisi dengan melihat tidak adanya ideologi yang spesifik yang menjadi landasan *platform* Partai Golkar sebagai preferensi kebijakan yang ditawarkan kepada pemilih pada saat kampanye pemilu. Namun kedua sisi tersebut baik proses rekrutmen kader partai dan ketidakhadiran ideologi yang spesifik di dalam Partai Golkar memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai sebuah proses yang saling terkait dengan pertimbangan yang merupakan keputusan Partai Golkar berdasarkan pendefinisian partai terhadap kondisi masyarakat Indonesia melalui pengalaman pemilu dan masalah-masalah yang dihadapi internal partai pasca rezim Orde Baru.

Penulis di dalam penelitan ini akan mengkaji tentang Demokratisasi yang ada di internal Partai Politik dengan mengambil studi kasus Munsyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar Tahun 2016. Penulis akan mengkaji dengan menggunakan desain metode penelitan kualitatif – deskriptif. Penulis juga menggunakan teori demokratisasi partai politik, demokrasi dan partai politik dan paradoks demokrasi dengan tiga fokus utama yang digunakan oligarki, transaksional partai politik, dan eliteisme sebagai alat analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah. Dari rumusan masalah penelitan, penulis akan menjawab dengan perkiraan jawaban yang akan dikemukakan penulis tentang demokratisasi partai politik terutama Partai Golkar yang belum maksimal berjalan di partai politik dikarenakan kondisi masyarakat secara umum di negara berkembang tepatnya di Indonesia yang cenderung pragmatis hingga di tingkat memilih pada perhelatan demokrasi pemungutan suara. Kondisi pragmatis tersebut juga diakibatkan oleh oligarki yang ada di internal Partai Golkar yang melakukan transaksi politik dan eliteisme oligarki tersebut yang membuat paradoks di Partai Golkar jadi nyata terutama pada saat Munasluh Partai Golkar 2016.

Demokratisasi Partai Politik.

Partai politik dapat diartikan sebagai atau didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya untuk berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut.⁸ Di sisi lain, Ranney dan Kendall (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol terhadap birokrasi dan kebijakan publik.⁹ Dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo (2006) menjelaskan bahwa Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.¹⁰

Alan Warre (1996) memiliki dua cara untuk dapat menerapkan mekanisme di dalam pemilihan seorang Ketua Umum Partai yaitu mengatakan bahwa:

⁷ Partai Golkar, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar Tahun 2016*, Anggaran Dasar, bab XVI tentang Quorum dan Pengambilan Keputusan, pasal 38, ayat 2 dan 3.

⁸ Firmanzah, *Op. Cit.*, hlm. 28.

⁹ Dalam Firmanzah, *Ibid.*

¹⁰ Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, hlm. 397.

*“to have democratic control of candidate selection to overcome the problem posed by the size of membership, the first to have loval meeting and so on until the final meeting into which the views expressed at the original local meeting and fed in or to hace all, all members vote directly in choosing candidates”.*¹¹

“untuk memeproleh kontrol/mekanisme demokratis di dalam pemilihan kandidat (pada partai) yang memiliki jumlah anggota yang besar yaitu pertama dengan melakukan pertemuan tingkat lokal hingga ke pertemuan tingkat akhir (pusat) dimana setiap pandangan dari pada anggota dari tingkat lokal masuk di dalam pertimbangan atau melalui mekanisme semua anggota hadir dan memilih secara langsung terhadap kandidat yang dicalonkan.”

Namun sebuah proses demokrasi internal tidak benar-benar menjamin bahwa proses yang berlangsung benar-benar demokratis. Kemenangan seorang Ketua Umum sangat ditentukan oleh kekuatan yang dimilikinya seperti latar belakang profesinya seperti militer, pengusaha, atau birokrat, memiliki dukungan massa, kemampuan finansial, kemampuan persuasif, dan lain sebagainya. Masing-masing kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para calon Ketua Umum untuk dapat memenangkan suara para kadernya. Namun seringkali para kader mengutamakan pragmatisme politik seperti tawaran uang, jabatan, dan insentif lainnya dengan menghilangkan pertimbangan penting seperti masa pengabdian seorang calon Ketua Umum di dalam partai, loyalitas, pertimbangan moral dan lain sebagainya.

Demokrasi dan Partai Politik di Negara Berkembang.

Pada hemat penulis, demokrasi secara umum memberikan peluang yang lebih memberikan keadilan bagi kehidupan bersama, ruang-ruang gerak yang lebih memadai bagi setiap manusia dan asosiasi manusia untuk mengembangkan kemanusiannya. Sayangnya, demokrasi bagi negara berkembang tidak dapat serta-merta diterapkan. Sebagaimana yang penulis kemukakan dalam *Reinventing Indonesia* (2008), bahwa demokrasi menyangkut “perangkat keras” (*hardware*), “perangkat lunak” (*software*), dan lingkungan. Dan tiga faset itu berlaku juga untuk setiap sistem politik dengan genus demokrasi, apa pun spesies-nya.¹²

Pemahaman bahwa demokrasi sebagai sebuah strategi (dan bukan tujuan) perlu difahami, karena demokrasi perlu difahami sebagai sebuah proses politik *modern –professionally managed*. Karena, pada akhirnya, seperti dicatat oleh *International Herald Tribune* (2010), bahwa :

*“democracy does not guarantee that you will never have an economic crises. We know that market overshoots. Investor takes crazy risk. Good governance is the only real protection. The most non-corrupt, transparent, and accountable financial system have been hurt the least. Those had democratic but corrupt system were hurt the second worst, but at least have been able to respond quickly by voting in better governance. (But) an corrupt, authoritarian regime, can’t adapt”.*¹³

“Demokrasi tidak menjamin bahwa Anda tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi. Kita tahu bahwa pasar melampaui batas. Investor mengambil risiko gila. Tata kelola yang baik adalah satu-satunya perlindungan nyata. Sistem keuangan yang paling tidak korup, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan paling tidak terluka. Mereka yang memiliki sistem demokratis tetapi korup dirugikan sebagai yang terburuk kedua, tetapi setidaknya mampu merespons dengan cepat dengan memilih dalam pemerintahan yang lebih baik. (Tapi) rezim yang korup dan otoriter, tidak bisa beradaptasi ”.

Akhirnya, kiranya diskusi dan pemahaman di atas membantu kita untuk tidak menjadi ‘buta’ dengan melihat demokrasi sebagai tujuan, karena jika sudah demikian, maka kita akan menghalalkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 296.

¹² *Reinventing Indonesia, Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*, Kommarudin Hidayat dan Putut Widjanarko (ed.), (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 32.

¹³ *Herald Tribune, Sink Will Fight Hometown Democracy*, <http://www.politics.heraldtribune.com/2010/01/31/sink-will-fight-hometown-democracy/>, *Herald Tribune Pers*, 2010, diakses pada 27 Desember 2018, hlm. 1.

segala cara untuk menjadi demokratis, termasuk menghancurkan tatanan dan kemajuan yang sudah dimiliki. Karena bagaimana pun juga perlu difahami, demokrasi adalah sistem politik terbaik yang termahal yang pernah ada di muka bumi. Untuk menyelenggarakannya diperlukan sebuah kapasitas, agar “mobil demokrasi” justru tidak menabrak rakyat kita sendiri. Karena itulah, agenda tanpa henti yang diperlukan oleh negara berkembang adalah mengembangkan *democratic capacity*/kapasitas demokrasi melalui proses pembelajaran dan penguatan kelembagaan.

Partai politik negara berkembang pada umumnya berfungsi sebagai suatu alat penting untuk mengorganisir kekuatan politiknya, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta ikut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, dan merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat serta memasukkannya ke dalam proses pembuatan keputusan. Di negara berkembang, partai politik berhadapan dengan masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang timpang. Lalu sukarnya menjadi jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Pada hakikatnya di semua negara berkembang partai politik memiliki peran yang berbeda, itu semua bergantung kepada bentuk pemerintahan, bentuk parlemen, dan bentuk sistem kabinet.

Paradoks Demokratisasi Internal Partai Politik.

Oligarki

Teori Oligarki secara komprehensif dijelaskan di dalam tulisan Jeffrey Winters (2011).¹⁴ Ia menjelaskan makna kata Oligarki berasal dari kata *Oligarch* yang berarti pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Lebih jauh menurut Winters (2011):

*“Kenyataannya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik termasuk dalam demokrasi. Penekanan terhadap dampak politik kesenjangan material – terhadap “kedidaksetaraan kondisi” – membuat bentuk-bentuk kekuasaan dan eksklusi minoritas oligarkis berbeda dengan yang lain. Seorang kandidat politik yang punya uang segunung untuk berkampanye sangat sukar dikalahkan. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh daripada yang dananya seret.”*¹⁵

Politik Transaksional

Boissevain dalam Sulaiman (2002) pendekatan transaksional terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan permainan atau tidak melanggar norma. Menurut Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem.¹⁶

Eliteisme

Vilfredo Pareto dalam Arba (1998) menyatakan bahwa setiap individu memiliki keunggulan dalam bidang tertentu dan kumpulan individu yang ada di dalam kelompok elite tentu memiliki kapabilitas masing-masing terhadap kemampuan yang dimilikinya. Terdapat dua jenis elite yakni

¹⁴ Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, (Jakarta:PT. Gramedia Putaka Utama, 2011), hlm 8.

¹⁵ *Ibid*, hlm 7-8.

¹⁶ Nizam Sulaiman, *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*, (Selangor: Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 82.

pertama *governing elitee* yang terdiri dari pemimpin-pemimpin yang secara langsung maupun tidak langsung ikut memerintah masyarakat. Dan kedua ialah *non-governmental elitee* yang terdiri dari bukan kelompok elite di dalam suatu negara sehingga ia tidak dapat memerintah masyarakat secara langsung.¹⁷

Konflik Munaslub Partai Golkar 2016

Konflik dalam internal Partai Golkar memuncak awalnya pada akhir pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Muhammad Hasan Saeful Rijal dan Wawan Ichwanudin pada tahun 2009 meneliteli tentang Partai Golkar pada tahun 1998 kehilangan Soeharto. Rijal dan Ichwanudin menunjukkan kehilangan figur seorang Soeharto menimbulkan persaingan antar aktor dalam internal Partai Golkar. Persaingan tersebut nyata pada masa pemilihan Ketua Umum. Kekalahan dalam perebutan Ketua Umum di tiap masa Musyawarah Nasional (Luar Biasa atau tidak) mengakibatkan perpecahan.¹⁸

Konflik antar elite Partai terjadi kembali pada tahun 2014-2016 yang pada akhirnya tercipta konsensus dihelatnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Konflik pada tahun 2014-2016 hampir menyebabkan perpecahan partai secara struktural –terjadi Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tandingan antar Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie menghelat Munas pada tanggal 30 November 2014 sampai 2 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali. Kubu Agung Laksono menghelat Munas pada tanggal 6 Desember 2014 sampai 8 Desember 2014 di Ancol, Jakarta. Dari kedua Munas tersebut menghasilkan keputusan yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹

Perhelatan Munaslub Partai Golkar 2016

Proses Munaslub tidak dilalui dengan jangka waktu dan tahapan yang cepat. Jangka waktu hingga Munaslub dihelat yang panjang dan tahapan-tahapan yang banyak. . Munaslub Partai Golkar 2016 selain memutuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, juga memutuskan keputusan lainnya yaitu:

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Munas Partai Golkar No. 5/Munas 9/2014 tentang Posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih;
2. Menginstruksikan kepada Ketua Umum Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional;
3. Pencabutan sanksi organisasi pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar atas nama Agung Gumiwang, Nusron Wahid dan beberapa kader lainnya;
4. Mengesahkan Aburizal Bakrie dari Ketua Umum Demisioner Partai Golkar menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dan;
5. Memutuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2021.

Transaksional Politik dari Hasil Munaslub 2016.

Hasil dari pemungutan suara dalam pemilihan Ketua Umum Munaslub Partai Golkar 2016 yaitu; Setya Novanto 277 suara, Ade Komarudin 173 suara, Aziz Syamsuddin 48 suara, Syahrul Yasin

¹⁷ Arba, *Demitologi Politik Indonesia Mengusung Eliteisme dalam Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cisendo, 1998), hlm. 42.

¹⁸ Muhammad Hasan Saeful Rijal dan Wawan Ichwanuddin, “*Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009*”, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47240%Hasan%20Saeful%20Rijal> , Universitas Indonesia, 2015, diakses pada 10 April 2019. hlm. 44.

¹⁹ Indra J. Piliang, “*Kronologi Perang Beringin*”, <http://www.selasar.com/jurnal/5583/Kronologi-Perang-Beringin>, Selasar, 2018, diakses pada 10 April 2019, hlm. 1.

Limpo 27 suara, Airlangga Hartarto 14 suara, Mahyudin 2 suara, Priyo Budi Santoso dan Indra Bambang Utoyo 1 suara. Setya Novanto dan Ade Komarudin beraturang kembali dalam mekanisme lobi yang diberikan oleh para pemilih dan panitia. Alhasil Setya Novanto berhasil jadi Ketua Umum Partai Golkar ke sembilan untuk periode 2016-2019. Kemenangan Setya Novanto tidak terlepas dari strategi dan kekuatan/sumber (*resources*) yang dimiliki olehnya. Berpijak dari mulai Munas 2004 dan 2009, ketika Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum terlihat bahwa ketiganya memiliki kesamaan latar belakang sebagai seorang saudagar kaya.

Faktor kekuatan finansial dan kedekatan dengan pemerintah yang nantinya akan memberikan akses jabatan kepada Partai Golkar menjadikan Setya Novanto unggul dibandingkan kandidat lainnya meskipun kekuatan finansial kandidat lainnya pun tidak kalah kuat. Ade Komarudin pun telah menyadari hal ini dan membiarkan Setya Novanto jadi Ketua Umum demi kondusifitas partai. Dan akhirnya Setya Novanto didaulat sebagai Ketua Umum terpilih Partai Golkar dalam Munaslub di tahun 2016.

Demokratisasi Internal Partai Golkar dalam Pemilihan Ketua Umum.

Sistem Pemilihan Ketua Umum Melalui Sistem Pemungutan Suara (*Voting*) dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Perebutan posisi Ketua Umum di Partai Golkar semenjak Reformasi berubah menjadi persaingan diantara kader-kader, dimana sebelumnya posisi Ketua Umum ditentukan oleh patron tunggal (Soeharto). Partai Golkar memiliki kesadaran politik dalam mengubah proses pemilihan Ketua Umum dan terlebih mempersilahkan para kader partai berebut kekuasaan dengan mekanisme yang sah (Munas).²⁰ Sesuai dengan AD Partai Golkar Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap kader memiliki hak untuk; bicara dan memberikan suara, memilih dan dipilih, dan membela diri. Peraturan tersebut adalah dasar bagi para kader untuk dapat memperoleh hak yang sama dalam pencalonan Ketua Umum. Dan peraturan tersebut juga tidak membedakan tiap kader seperti latar belakang ekonomi, sosial dan politik-nya. Begitupula tiap kader memiliki hak dalam menentukan kepemimpinan ideal terutama dalam memilih Ketua Umum.

Transaksi Elitee dalam Memutuskan Hasil Munaslub Partai Golkar 2016

Realitas politik yang terjadi dalam, partai politik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia menunjukkan bahwa partai politik adalah struktur yang dominan, entitas yang dibenarkan masyarakat sesuai visi dan keabsahannya. Dengan dalil pembangunan, kesejahteraan, kepentingan rakyat, intervensi partai politik seolah-olah sah, hingga masuk ke sisi terkecil kehidupan masyarakat sekalipun. Sehingga disinilah letak dominasi perspektif –dominasi struktur yang dikembangkan partai politik, sebagai wacana satu-satunya yang berhak hidup dan berkembang, mengabaikan adanya kekuatan masyarakat.

Kontestasi Eliteisme Saudagar Kaya dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Adanya hasil tersebut bukan berarti dapat dengan mudah menjustifikasi bahwa Ketua Umum yang akan terpilih adalah calon yang paling kaya. Tiap Calon Ketua Umum secara pribadi memiliki keunggulan tersendiri juga dalam aspek strategi politik yang digunakan juga akan menentukan hasil pemilihan. Situasi eksternal partai pun juga berpengaruh terhadap terpilihnya Calon Ketua Umum. Kontestasi perebutan posisi Ketua Umum pun jadi pertarungan yang menarik. Mulai dari proses pengumpulan atau penggunaan sumber daya/*resources*, perangkulan calon pemilih, penanaman isu-

²⁰ Hajriyanto Y. Thohari, *Pasca Konversi Kini Konvensi Esei-Esei Politik tentang Golkar*, (Surakarta: The Hajriyanto Cender, 2004), hlm. 162.

isu ke tiap kader, dan juga cara lainnya seperti membentuk faksi yang nantinya semua hal tersebut digunakan untuk memenangkan pemungutan suara di Munaslub Partai Golkar 2016.

Kemenangan Oligark dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Setya Novanto yang terpilih jadi Ketua Umum, mengikuti rekam jejak Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sebelumnya. Jusuf Kalla menggunakan sumber daya kekuasaan yaitu menjabat sebagai Wakil Presiden dan sumber daya kekuatan finansial karena memiliki dana yang besar untuk membiayai kampanye mensukseskan pemilihnya. Aburizal Bakrie juga menggunakan sumber daya kekuasaannya yaitu menjabat sebagai Menteri pada era Presiden Susilo Bambang dan juga sumber daya kekuatan finansial yang tinggi. Sebagai seorang oligark, sumber dana untuk mendapatkan dukungan merupakan hal yang tidak sulit bagi Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie bahkan Setya Novanto. Pragmatisme politik telah menjadi mentalitas para kader Partai Golkar terutama untuk menentukan pilihan Ketua Umum. Sejak Munas 2004 dan 2009 nuansa pragmatisme politik menjadi pengalaman dan berkelanjutan pada Munaslub 2016.

Paradoks Demokratisasi Internal Partai Politik

Konsensus Eliteisme Melalui Munaslub Partai Golkar 2016

Kepentingan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono menyebabkan Partai Golkar sulit untuk mencapai konsensus politik. Pada hasil Munaslub Partai Golkar 2016, dengan mengembalikan posisi Dewan Pembina Partai Golkar yang sebelumnya hilang pada masa reformasi, jadi penengah bagi kepentingan Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono. Posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dianggap oleh Aburizal Bakrie sebagai keuntungan karena ia akan tetap memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Disisi lain, Agung Laksono mendapatkan jabatan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Merit Sistem yang Gagal dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Upaya Partai Golkar dalam mendemokratisasi internal-nya ternyata mengalami babak kemunduran karena proses demokrasi mengarah pada Sistem Oligarki. Sistem ini telah dirasakan yang tanpa sadar terbangun di dalam mentalitas internal Partai Golkar sejak kekalahan Akbar Tandjung di Munas 2004 melawan Jusuf Kalla. Ketika itu, Akbar Tandjung menggaungkan semangat reformasi =dimana Ia menjadi Ketua Umum yang memiliki fokus utama dalam pembangunan partai dengan prestasinya dalam beragam kebijakan partai yang jadi faktor utama suksesnya Partai Golkar dengan latar belakang tanpa jabatan apa –pun di pemerintahan atau kekuasaan lainnya. Kekalahannya oleh Jusuf Kalla sebagai aktor ‘saudagar kaya’ jadi momentum berakhirnya Sistem Merit. Fenomena ini tampak dan jadi hegemoni dalam pemilihan di Munaslub Partai Golkar 2016.

Pembiayaan yang Terlalu Besar untuk Kebutuhan Partai Golkar dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Partai Golkar seakan mengalami dilema tentang pendanaan partai. Di satu sisi, Partai Golkar tidak mungkin berharap kepada bantuan dana dari pemerintah, di sisi lainnya Partai Golkar akan ketergantungan dengan individu yang akan jadi sosok pemberi dana –bahkan sosok tersebut nantinya akan jadi Ketua Umum. Biaya operasional Partai Golkar membutuhkan dana sebesar kurang lebih 10 Miliar Rupiah per bulan. Angka 10 Miliar tersebut digunakan untuk DPD I masing-masing 150 Juta Rupiah, dan *overhead* DPP 5 - 6 Miliar Rupiah.²¹ Begitu pula Nominal tersebut menandakan bahwa memang sosok dibutuhkan oleh Partai Golkar agar memiliki sosok dengan kekuatan finansial yang besar untuk segala aktivitas partai.

Pragmatisme Politik dalam Munaslub Partai Golkar 2016

Munaslub Partai Golkar 2016 menuai banyak intensi atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum mengalahkan ke-tujuh calon lainnya termasuk Ade Komarudin. Setya Novanto sendiri pun

²¹ DPP Partai Golkar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai Golkar 2016.

dalam proses pencalonan sebagai Ketua Umum mendapat banyak kritikan, karena ada kasus hukum yang masih dalam tahap penyidikan dan ada intrik juga yang mengatasnamakan diri-nya. Dibandingkan Setya Novanto, Ade Komarudin adalah sosok kader partai yang telah melakukan pengabdian pada parta secara loyal tanpa menimbulkan intrik maupun terjerat kasus yang pada akhirnya meruntuhkan elektabilitas partai baik di skla lokal maupun nasional. Namun disayangkan bahwa Ade Komarudin pun memilih untuk mundur dengan alasan dirinya lebih muda ketimbang Setya Novanto. Munaslub Partai Golkar 2016 di proses pemilihan Ketua Umum –nya terlihat begitu *lack of political ideology debate*. Persaingan tidak berlandaskan perdebatan antar Calon Ketua Umum yang menyangkut visi-misi dan pandangan politik tentang ide kebijakan tentang partai kedepannya. Para pemilih tidak disuguhkan pertarungan dengan strategi politik dan kebijakan partai dari masing-masing Calon Ketua Umum. Para pemilih tidak dapat berpikir dengan akal sehat dan pemikiran yang rasional dalam menentukan Calon Ketua Umum yang baru.

Sulitnya Memperbaiki Sistem Demokratisasi Partai Politik Dilihat dari Munaslub Partai Golkar 2016

Munculnya paradoks demokrasi dalam Munaslub Partai Golkar 2016 memiliki dampak yang lebih kepada Partai Golkar sebagai bagian dari *suprastruktur* politik di dalam negara demokrasi. Masyarakat yang akan memilih kader Partai Golkar untuk jabatan publik melalui pemilihan umum – mereka akan ada dalam suatu kondisi dilematis antar menggunakan hak pilihnya atau tidak memilih karena alasan adanya paradoks demokrasi di dalam Partai Golkar. Proses ini merupakan bagian integral untuk memahami proses demokrasi secara keseluruhan.²² Dalam artian Partai Politik sebagai bagian dari negara demokrasi merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi secara keseluruhan.

Proses demokratisasi Munaslub Partai Golkar 2016 mengalami puncaknya pada saat pemilihan Ketua Umum. Proses ini merupakan penyelenggaraan secara berkala dengan maksud menciptakan sebuah sistem yang teratur dimana ada perbaikan sistem kepemimpinan dari periode ke periode.²³ Akan tetapi yang fakta Munaslub Partai Golkar 2016 terdapat paradoks demokrasi. Proses demokratisasi menekankan aspek keaktifan partisipasi dari tiap individu yang terkait dengan proses demokrasi yang berlangsung. Proses demokratisasi mengubah posisi individu yang pasif menjadi aktif. Tetapi dalam Munaslub Partai Golkar 2016, keaktifan kadernya berupa memilih dalam proses pemungutan suara. Demokrasi prosedural jadi lebih tinggi tingkatnya ketimbang demokrasi substansial. Demokrasi substansial membahas tentang keadilan sosial individunya. Keadilan sosial ini jika dijabarkan lebih konkret dari kasus Munaslub Partai Golkar 2016 adalah menyangkut pemerataan kebebasan berpendapat.

Oligarki Menyandera Partai Golkar

Berdasarkan hasil penelitian dinamika Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2016 dengan rumusan masalah peneliteiten bagaimana demokratisasi internal partai poltiik, dapat ditarik kesimpulan dengan fakta empiris dan teoritis. Demokratisasi internal di internal Partai Golkar masih terhambat karena adanya paradoks demokrasi yang terjadi di dalam proses institusionalisasinya dan itu terlihat di dalam studi kasus Munaslub Partai Golkar 2016. Demokratisasi Internal partai politik di Indonesia mengalami dinamika yang berbeda di tiap partai. Partai Golkar sebagai salah satu partai

²² Argumentasi ini didasari oleh pemikiran Spencer dan Henessey dalam Wellhofer E. Spencer and Timothy M. Hennessey, *Political Party Development: Institutionalization Leadership Recruitment, and Behavior*, American Journal of Political Science, Vol. 18, No. 1 (New York: American Journal, 1974), hlm. 135-165.

²³ Argumentasi ini didasari oleh pemikiran Benjamin Goldfrank, *The Politics of Deepening Local Democracy: Decentralization, Party Institutionalizations, and Participation*, Jurnal Comparative Politics, Vol. 39, No. 2, (New York: Comparative Politics, 2007), hlm. 147.

di Indonesia mengalami dinamika serupa walaupun tetap berbeda selain memang secara nomenklatur juga di proses institusionalisasinya.

Penulis menyarankan kepada penelitel selanjutnya dalam menulis karya ilmiah dalam segala bentuk yang bertemakan demokratisasi internal partai politik dan menggunakan metode penelitelian kualitatif agar dapat melakukan wawancara mendalam kepada informan inti dan mendapatkan studi kepustakaan/dokumentasi secara lengkap dan menyeluruh. Begitu pula penelitel selanjutnya juga dapat memiliki informan atau studi kepustakaan/dokumentasi substitusi jika kemungkinan terburuk ketika tidak tercapainya harapan akan kelengkapan data inti. Analisis harus dapat dijawab sesuai dengan rumusan masalah yang diampu.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang yang telah mengembangkan Wisata Candi Gedung Songo, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- A. Caporaso, James dan David P. 2008. *Teori-teori Ekonomi Politik*. Jakarta. Pustaka Pelajar.
- A. Winters, Jeffrey. *Oligarki*. Terj. Jakarta. PT. Gramedia Putaka Utama
- Amal, Ichlasul. (ed.). 1988. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Arba. 1998. *Demitologi Politik Indonesia Mengusung Eliteisme dalam Orde Baru*. Jakarta. Pustaka Cisendo.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Azra, Azyumardi. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Media.
- Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitelian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Perdana Media Grup.
- Cipto, Bambang. 2000. *Partai Kekuasaan dan Militer*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Crouch, Harlod. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca. Cornell University Perss.
- Fatah, Saefulla. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antar Pemahaman dan Realitas*. Jakarta. Yayasan Obor.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Haris, Syammsuddin. 2004. *General Elections Under the New Order*. dalam Hans Antlov dan Sven Cendderoth (ed.). *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond*. Curzon. Routledge Press.
- Hidayat, Kommarudin dan Putut Widjanarko (ed.). 2008. *Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa dalam Reinventing Indonesia*. Bandung. Mizan.

- Jenkins, David. 1984. *Soeharto and His Generals: Indonesian Military in Politics 1975-1983*. Ithaca. Cornell University Press.
- Keller, Suzanna. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Landman, Todd. 2000. *Issues and Methods in comparative politics*. London and New York. Routledge.
- Lubis, Sofjan. dkk, 1994. *30 Tahun GOLKAR*. Jakarta. DPP Golkar.
- Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. 2006. *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization*. London. Sage. Richard. S dan William Crotty (ed.). 2006. *Hand Book of Party Politics*. London. Sage.
- May Rudy, T.. 2003. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Meny, Yves dan Andre Knapp. 1998. *Government and Politics in Western Europe: Britain, Frence, Italy, Germany (Comparative European Politics*. Inggris. Oxford University Press.
- Merriam, Sharan. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Fransisco. John Wiley & Sons Inc.
- Michael, Robert. 1984. *Partai Politik Dalam Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*. Terj.. Jakarta: Rajawali Press.
- Murtopo, Ali. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta. Yayasan Proklamasi-CSIS.
- Nasution. 2007. *Metode Research (Peneliteian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- P. Huntington, Samuel. 1968. *Political Order in Changin Societies*. New Haven. Yale University Press.
- . 1993. *The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century*, Norman. Oklahoma. University of Oklahoma Press.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta. Institute For Democracy And Welfarism.
- Potter, David. 2006. *NGO in International Politics*. New York. Kumarian Press Inc.
- Pratigny, Imam. 2010. *Ungkapan Sejarah: Lahirnya Golongan Karya, Perjanjian Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta. Yayasan Bakti T.P.
- Ramses, Andy dan La Bakry (ed.). 2009. *Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Terj. Jakarta. MIPI.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional.
- Sandelowski, Margarete. 2006. *Handbook for Synthesizinng Qualitative Research*. New York. Springer.
- Sanit, Arbi. 2003. *Pembaharuan Mendasar Partai Politik dalam Mahrus Irsyam*. Lili Romli (ed.). *Menggugat Partai Politik*. Jakarta. Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.
- Sorensen. Georg. 2007. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in Changing World, Third Edition (Dilemmas in World Politics)*. London. Routledge.
- Sulaiman, Nizam. 2002. *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. Selangor. Universitas Kebangsaan Malaysia.

- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer, Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta. LP3ES.
- . 1998. *Interpreting Indonesian Politics*. Singapore. Times Academic Press.
- Taupan, M. 1989. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta. Sinar Grafika.
- W. Creswell, Jhon. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mix*. Terj. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wahyuno, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- William Liddle, R. 1982. *Pemilu 1977: Suatu Tinjauan*. Yogyakarta Kelompok Studi Batas Kota.
- Bahasoan, Awad. *Golongan Karya Mencari Format Politik Baru*. Dalam pilihan artikel prisma. *Analisa Kekuatan Politik Indonesia*. Jakarta. CSIS.
- Biorcio, R dan R. Mannheimer. 1995. *Relationship Between Citizens and Political Parties* dalam H. D. Klingemann dan D. Fuchs. *Citizens and State*. Oxford. Oxford University Press.
- C. Mueller, Wolfgang. 1997. *Inside the Black Box: A Confrontation of Party Behavior and Theories of Party Organizational Change*. Jurnal Partai Politik. Vol. 3. Nomor 3. California. Sage Journal.
- Freedom House. 2018. *The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties*. Arch Puddington (ed.). New York & Washington DC. Rowman & Littlefield.
- H. Nur Syam. 2012. *Jajak Reformasi di Dalam Lintasan Sosio-Historis*. Jurnal Politik Vol. 1. London. Core.
- Hagaita Tarigan, Yossi. Tesis. 2016. *Lemahnya Pelembagaan Mengakibatkan Konflik Partai Golkar Pada November 2014-Janari 2016: Studi Kasus Munas Bali dan Munas Ancol*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Tentang Penulis

Bob Samuel adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.